



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur 13640

Telepon: (021) 8091908

Laman: <https://www.bphn.go.id>, Pos-el: jdihn@kemenkum.go.id

BERITA ACARA
PENILAIAN KINERJA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL TAHUN 2025
PADA KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor **PHN-32.HN.03.05 TAHUN 2026** tanggal **4 Maret 2026** tentang Tim Penilaian Kinerja Anggota JDihn, Tim Penilai telah melakukan penilaian Kinerja Anggota JDihn Tahun 2025 pada **Kabupaten Cirebon**, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
VAR I	Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat	58	49
ID. I	Tersedianya Dokumen Hukum yang Dihasilkan Secara Lengkap	35	31
	A. PUU/Peraturan/Putusan Yang Ditetapkan di Tahun Pelaporan	15	15
	1. A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditetapkan di Tahun Pelaporan		
	2. B. Indikator Khusus		
	1. B. 1. Putusan/Rekomendasi Lembaga Quasi Peradilan		
	2. B. 2. Peraturan Rektor (khusus bagi perguruan tinggi)		
	B. C. Dokumen Hukum Lain	20	16
	1. C. 1. Program Penyusunan PUU	4	4
	2. C. 2. Rancangan Peraturan Perundang-undangan	4	3
	3. C. 3. Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan/ Naskah Urgensi	4	3
	4. C. 4. Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Hasil Analisis dan Evaluasi	4	4
	5. C. 5. Risalah pembahasan	2	1
	6. C. 6. Kajian Hukum/Hasil Penelitian Hukum	2	1
ID. II	Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum	23	18
	A. 1. Metadata, Pengisian, dan Abstrak PUU yang Sesuai Standar	15	10
	B. 2. Diseminasi Produk Hukum	8	8

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
VAR II	Aksesibilitas Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum	27	25
ID. I	Tersedianya Sistem Informasi secara Online	27	25
	A. 1. Website JDIH Menampilkan Menu Publikasi Dokumen Pembentukan PUU	10	10
	B. 2. Tampilan Detail Dokumen Hukum	7	6
	1. 2. a. Peraturan	4	3
	2. 2. b. Dokumen Hukum Lain	2	2
	3. 2. c. Putusan	1	1
	C. 3. Fitur Pencarian Lanjutan	2	2
	D. 4. Statistik	5	4
	1. 4. a. Statistik Jumlah Seluruh Dokumen Hukum	1	1
	2. 4. b. Statistik Jumlah Seluruh Koleksi PUU	1	1
	3. 4. c. Statistik Berdasarkan Status Keberlakuan PUU	1	0
	4. 4. d. Statistik Jumlah PUU Berdasarkan Jenis	1	1
	5. 4. e. Statistik Jumlah Pengunjung yang Mengakses Dokumen Hukum/Website	1	1
	E. 5. Anggota JDIHN Memiliki Aplikasi Berbasis Mobile	3	3
VAR III	Integrasi dan Sinkronisasi Dokumen Hukum	5	5
ID. I	Tersedianya Dokumen Hukum Anggota JDIH Pada Laman jdihn.go.id	5	5
	A. 1. Dokumentasi integrasi disertai tautan URL API integrasi terbaru yang aktif dan sukses		
	B. 2. Capture Sinkronisasi (Update Log/Sync)		
VAR IV	Pengembangan JDIH	10	8
ID. I	IV. 1. Layanan Informasi Hukum Secara On-Site	3	3
ID. II	IV. 2. Peraturan Terjemahan	2	0
ID. III	IV. 3. Pengembangan aplikasi yang mendukung peningkatan layanan JDIH	2	2
ID. IV	IV. 4. Layanan informasi hukum bagi penyandang disabilitas	2	2
ID. V	IV. 5. Evaluasi Mandiri	1	1
	A. 1. Evaluasi Aspek Penyelenggaraan JDIH		
	B. 2. Identifikasi Kendala/Hambatan Penyelenggaraan JDIH		
	C. 3. Rencana Tindak Lanjut Pengembangan JDIH		
	D. 4. Laporan Evaluasi Mandiri	1	1

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
TOTAL NILAI			87

Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilaian Kinerja Anggota JDIHN terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Catatan
VAR I	Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat	
ID. I	Tersedianya Dokumen Hukum yang Dihasilkan Secara Lengkap	
	A. PUU/Peraturan/Putusan Yang Ditetapkan di Tahun Pelaporan	Kelengkapan unggahan dokumen peraturan yang ditetapkan oleh instansi telah terpenuhi sebanyak 91% - 100%
	1. A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditetapkan di Tahun Pelaporan	
	2. B. Indikator Khusus	
	1. B. 1. Putusan/Rekomendasi Lembaga Quasi Peradilan	
	2. B. 2. Peraturan Rektor (khusus bagi perguruan tinggi)	
	B. C. Dokumen Hukum Lain	
	1. C. 1. Program Penyusunan PUU	Instansi melampirkan SK Progsun/Proleg/Propempera/ P PUU pada tahun pelaporan
	2. C. 2. Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Instansi belum melakukan pengolahan rancangan PUU pada website JDIH secara lengkap dan sesuai dengan PUU yang diundangkan
	3. C. 3. Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan/ Naskah Urgensi	Instansi belum melakukan pengolahan dokumen hukum lain jenis NA/Keterangan/Penjelasan/Naskah Urgensi Rancangan Peraturan pada website JDIH secara lengkap dan sesuai dengan PUU yang diundangkan
	4. C. 4. Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Hasil Analisis dan Evaluasi	Instansi telah melakukan pengolahan dokumen hukum lain jenis laporan hasil AE/Pemantauan Peninjauan pada website JDIH

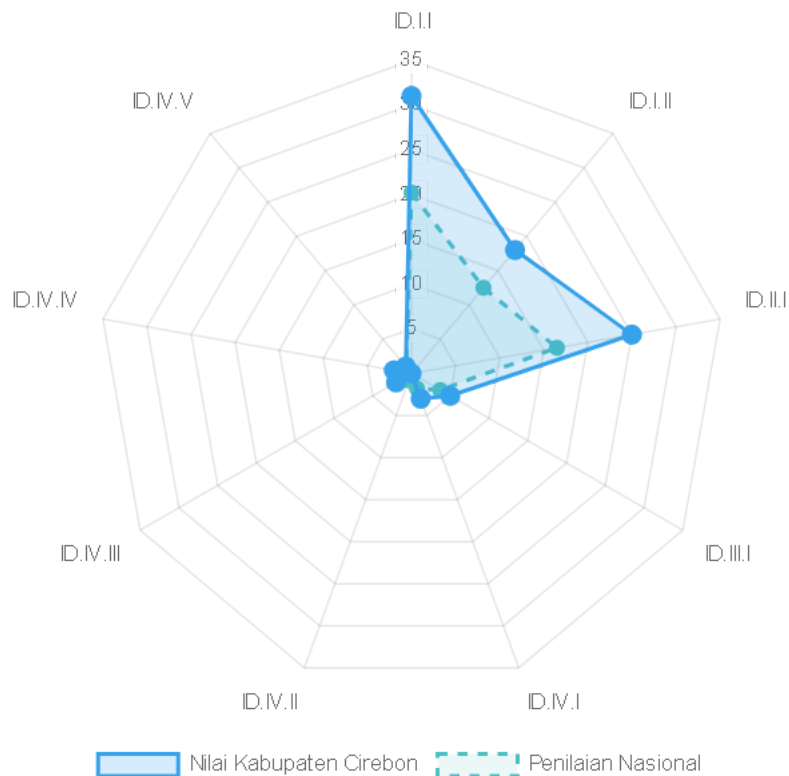
No	Variabel dan Indikator	Catatan
	5. C. 5. Risalah pembahasan	Instansi belum melakukan pengolahan dokumen hukum lain jenis risalah pembahasan PUU yang telah diundangkan di tahun pelaporan pada website JDIH;
	6. C. 6. Kajian Hukum/Hasil Penelitian Hukum	Instansi belum melakukan pengolahan dokumen hukum lain jenis kajian hukum/hasil penelitian hukum yang diterbitkan di tahun pelaporan pada website JDIH
ID. II	Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum	
	A. 1. Metadata, Pengisian, dan Abstrak PUU yang Sesuai Standar	- Metadata sesuai (kurang dokumen terkait dan peraturan pelaksana)= 5 - Pengisian Metadata sesuai = 5 - Abstrak tidak ada = 0
	B. 2. Diseminasi Produk Hukum	Tersedia lebih dari 12 konten dokumen dan informasi hukum (konten JDIH) pada media sosial JDIH instansi
VAR II	Aksesibilitas Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum	
ID. I	Tersedianya Sistem Informasi secara Online	
	A. 1. Website JDIH Menampilkan Menu Publikasi Dokumen Pembentukan PUU	Website JDIH telah menampilkan menu khusus publikasi dokumen pembentukan PUU secara lengkap (naskah akademik/naskah urgensi/keterangan/penjelasan, rancangan PUU, hasil pemantauan dan peninjauan UU/hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara keseluruhan) kurang menu khusus progsun/propem.
	B. 2. Tampilan Detail Dokumen Hukum	
	1. 2. a. Peraturan	Detail dokumen hukum PUU belum dilengkapi dengan metadata tambahan sesuai dengan pedoman pelaporan JDIH (tidak ada dokumen terkait dan peraturan pelaksana)
	2. 2. b. Dokumen Hukum Lain	Tampilan detail dokumen hukum lain sudah sesuai standar dan

No	Variabel dan Indikator	Catatan
		diolah pada tipe pengolahan monografi hukum
	3. 2. c. Putusan	Tampilan detail putusan sudah sesuai standar dan diolah pada tipe pengolahan putusan/yurisprudensi
	C. 3. Fitur Pencarian Lanjutan	Website JDIH telah tersedia fitur pencarian lanjutan
	D. 4. Statistik	
	1. 4. a. Statistik Jumlah Seluruh Dokumen Hukum	Tersedia statistik jumlah seluruh dokumen hukum pada website JDIH
	2. 4. b. Statistik Jumlah Seluruh Koleksi PUU	Tersedia statistik jumlah seluruh koleksi PUU pada website JDIH
	3. 4. c. Statistik Berdasarkan Status Keberlakuan PUU	Tidak ada bukti dukung
	4. 4. d. Statistik Jumlah PUU Berdasarkan Jenis	Tersedia statistik jumlah PUU berdasarkan jenis
	5. 4. e. Statistik Jumlah Pengunjung yang Mengakses Dokumen Hukum/Website	Tersedia statistik jumlah pengunjung yang mengakses dokumen hukum/website
	E. 5. Anggota JDIHN Memiliki Aplikasi Berbasis Mobile	Anggota JDIHN telah memiliki aplikasi berbasis mobile dan website yang responsif terhadap perangkat mobile
VAR III	Integrasi dan Sinkronisasi Dokumen Hukum	
ID. I	Tersedianya Dokumen Hukum Anggota JDIH Pada Laman jdihn.go.id	Anggota JDIH telah terintegrasi dengan Portal JDIHN, URL API aktif, dan telah melaksanakan sync dokumen hukum secara berkala pada saat pelaporan
	A. 1. Dokumentasi integrasi disertai tautan URL API integrasi terbaru yang aktif dan sukses	
	B. 2. Capture Sinkronisasi (Update Log/Sync)	
VAR IV	Pengembangan JDIH	
ID. I	IV. 1. Layanan Informasi Hukum Secara On-Site	Anggota JDIHN memiliki layanan informasi hukum secara on-site yang dapat dikunjungi secara langsung/fisik oleh pengguna
ID. II	IV. 2. Peraturan Terjemahan	Tidak ada bukti dukung

No	Variabel dan Indikator	Catatan
ID. III	IV. 3. Pengembangan aplikasi yang mendukung peningkatan layanan JDIH	Anggota JDIHN telah melakukan pengembangan aplikasi yang mendukung peningkatan layanan JDIH berupa pemanfaatan AI/menu penyusunan PUU/peningkatan keamanan website/fitur survey kepuasan masyarakat
ID. IV	IV. 4. Layanan informasi hukum bagi penyandang disabilitas	Anggota JDIHN memiliki layanan informasi hukum bagi penyandang disabilitas berupa fitur aksesibilitas/dokumen hukum bersuara dan telah tersedia pada website JDIHnya
ID. V	IV. 5. Evaluasi Mandiri	
	A. 1. Evaluasi Aspek Penyelenggaraan JDIH	
	B. 2. Identifikasi Kendala/Hambatan Penyelenggaraan JDIH	
	C. 3. Rencana Tindak Lanjut Pengembangan JDIH	
	D. 4. Laporan Evaluasi Mandiri	Anggota JDIH telah melakukan kewajibannya untuk evaluasi mandiri pengelolaan JDIH di lingkungan instansinya pada tahun pelaporan sesuai dengan aspek pembinaan JDIH yang diatur dalam Perpres 33/2012

Grafik Radar Penilaian Kinerja Anggota JDIHN

Kabupaten Cirebon — Tahun 2025



Demikian Berita Acara Penilaian Kinerja Anggota JDIHN ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pembina JDIHN

Jakarta, 11 Maret 2026

Penanggung jawab

Machyudhie

NIP. 197609172003121001

Mutia Yustika

NIP. 197610132006042001

Anggota Tim Penilai

Muhamad Zahiruddin Nurdiansyah

NIP. 198206272001121001

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik melalui sistem e-Report JDIHN - Kementerian Hukum.

Timestamp: 11-03-2026 04:38:11 WIB